BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hampir setiap negara memperoleh pendapatan yang berasal dari pajak. Demikian juga, Indonesia yang pendapatannya berasal dari pajak. Indonesia adalah negara yang pendapatannya berasal dari penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak dan hibah sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2003 pasal 11 angka 3. Sumber penerimaan terbesar negara diperoleh dari penerimaan pajak. Pajak memberikan kontribusi pendapatan negara yang paling utama untuk penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Penerimaan terbesar negara yang berasal dari pajak menyebabkan perbedaan kepentingan antara pemerintah dan Wajib Pajak. Pemerintah mengharapkan wajib pajak dapat membayar pajak terutangnya sebagai sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sebaliknya, Wajib Pajak berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin karena bagi Wajib Pajak pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih.

Pajak menjadi salah satu alasan perusahaan mengurangi laba bersih yang dilaporkan untuk memperkecil pembebanan pajak penghasilan yang tinggi. Perilaku manajemen yang seperti inilah yang dikenal dengan istilah *earnings management*, di mana perusahaan mengatur laporan keuangan untuk meminimalkan laba bersih yang dilaporkan agar beban pajak menjadi relatif

rendah. Sehingga perusahaan tetap dapat bertanggungjawab untuk membayar kewajibannya kepada negara, karena mengingat pajak adalah pendapatan utama yang memberi kontribusi tinggi untuk membiayai pembangunan negara. Sektor perpajakan mempunyai proporsi lebih dari 50% dari penerimaan APBN. Hal ini memicu berbagai kebijakan dilakukan oleh pemerintah untuk selalu meningkatkan penerimaan dalam sektor pajak secara optimal, salah satunya dengan melakukan perubahan undang-undang perpajakan (Widyawanti, 2014).

Pada tahun 2008 pemerintah melakukan perubahan terhadap undang-undang pajak penghasilan yaitu dengan diterbitkan UU Nomor 36 tahun 2008. Undang-undang tersebut memberikan insentif dan kemudahan untuk wajib pajak. Salah satu insentif tersebut adalah penurunan tarif pajak, dimana tarif pajak badan mengalami penurunan dari tarif progresif menjadi tarif tunggal, yaitu (1) pada tahun 2009 menggunakan tarif sebesar 28% dan tahun 2010 menggunakan tarif 25%, (2) 5% dari tarif nomor (1) untuk perusahaan yang telah *go public* dan minimal 40% sahamnya diperdagangkan di bursa efek dan (3) sesuai dengan UU PPh No. 36 Tahun 2008 pasal 31E Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif nomor (1) atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) (Ristiyanti dan Syafruddin, 2012).

Salah satu upaya yang dilakukan manajemen untuk memperoleh keuntungan dari adanya perubahan tarif pajak badan ini adalah *tax shifting* yaitu

dengan memindahkan laba tahun sebelum perubahan tarif pajak badan ke tahun sesudah perubahan tarif pajak. Menurut akuntansi hal ini dapat diterima karena akuntansi menganut prinsip *accrual basis* dimana pada dasarnya basis akrual digunakan untuk pengakuan pendapatan (*revenue*) dan beban (*expense*) yang dilakukan pada periode dimana seharusnya pendapatan dan beban tersebut terjadi tanpa memperhatikan waktu penerimaan/pengeluaran kas dari pendapatan/beban yang bersangkutan (Wijaya dan Martani, 2011).

Sitorus dan Handayani (2010) meneliti adanya indikasi manajemen laba sebelum dan sesudah perubahan tarif pajak penghasilan badan tahun 2008. Hasil penelitian ini tidak mengindikasikan bahwa perusahaan berusaha melakukan rekayasa akrual untuk meminimalkan laba periode sebelum perubahan tarif pajak tahun 2008. Di samping itu dengan adanya perubahan undang-undang perpajakan, praktik manajemen laba tidak dilakukan.

Wijaya dan Martani (2011) meneliti praktik manajemen laba perusahaan dalam menanggapi penurunan tarif pajak sesuai UU No. 36 tahun 2008. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa perusahaan melakukan manajemen laba dalam menanggapi penurunan tarif pajak badan di Indonesia.

Ristiyanti dan Syafruddin (2012) meneliti manajemen laba sebagai respon perubahan tarif pajak penghasilan badan. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa pada tahun 2007, 2008, 2009 dan 2010 perusahaan laba terbukti melakukan manajemen laba dalam merespon perubahan tarif pajak, sedangkan pada perusahaan rugi hanya pada tahun 2008 terbukti melakukan manajemen laba. Dan pada tahun 2007, 2009 dan 2010 perusahaan rugi tidak

terbukti melakukan manajemen laba . Jadi, dalam merespon perubahan tarif pajak, perusahaan melakukan manajemen laba sebelum dan setelah perubahan tarif pajak.

Selain faktor perubahan tarif pajak penghasilan badan yang dapat berpengaruh terhadap manajemen laba, yang dirujuk dari beberapa penelitian di atas. Penelitian ini menambahkan variabel konservatisme sebagai variabel tambahan untuk menguji pengaruh konservatisme terhadap manajemen laba.

Konservatisme merupakan salah satu dari prinsip akuntansi. Pada prinsipnya konservatisme (*conservatism*) adalah suatu prinsip yang menunda pengakuan pendapatan atau laba sebelum ada bukti-bukti yang mendukung dan sebaliknya mengakui biaya atau rugi secepat mungkin. Hal ini menyebabkan prinsip konservatisme mengurangi tingkat keandalan dan relevansi informasi akuntansi.

Konservatisme adalah reaksi yang hati-hati (*prudent reaction*) dalam menghadapi ketidakpastian yang melekat pada perusahaan untuk mencoba memastikan bahwa ketidakpastian dan risiko yang *inherent* dalam lingkungan bisnis sudah cukup dipertimbangkan. Konservatisme merupakan praktik akuntansi dengan mengurangi laba dan menurunkan nilai aktiva bersih ketika menghadapi *bad news* akan tetapi tidak meningkatkan laba dan menaikkan nilai aktiva bersih ketika menghadapi *good news* (Jamaluddin, 2011).

Umumnya perusahaan di Indonesia memilih akuntansi konservatif. Kenyataannya, konservatisme merupakan konsep yang kontroversial. Para pengkritik konservatisme menyatakan bahwa konsep konservatisme menyebabkan

laporan keuangan yang bias karena menyebabkan kualitas laba yang dihasilkan menjadi lebih rendah dan kurang relevan, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai alat oleh pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi risiko perusahaan (Anggraini dan Trisnawati, 2008). Penelitian Feltham-Ohison (1996) dalam Raharja dan Sandra (2013) membuktikan bahwa akuntansi yang konservatif dapat membantu para pengguna laporan keuangan dalam menganalisis laporan keuangan suatu perusahaan dengan nilai laba dan aktiva yang dilaporkan tidak *overstate* atau dilebih-lebihkan.

Penelitian Givoly dan Hayn (2002) dalam Raharja dan Sandra (2013) menemukan bahwa penerapan prinsip konservatisme semakin meningkat dalam beberapa dekade terakhir dan laporan keuangan perusahaan menjadi semakin konservatif. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan prinsip konservatisme dalam pelaporan keuangan semakin meluas.

Kecenderungan penyimpangan penggunaan akuntansi konservatif oleh perusahaan dalam kaitannya dengan pajak penghasilan tinggi. Manajer perusahaan mungkin saja dengan sengaja menurunkan labanya dengan aturan yang diperbolehkan dalam prinsip akuntansi konservatif untuk tujuan tertentu seperti, untuk menekan kewajiban pembayaran pajak penghasilan badan yang harus ditanggungnya (Putri dan Noviari, 2013).

Menurut Penman dan Zhang (2002) dalam Wicaksono (2012) menyatakan bahwa konservatisme akuntansi dapat menurunkan kualitas labanya, yaitu ketika perusahaan mempraktikkan konservatisme kemudian menurunkan jumlah investasinya, maka perusahaan tersebut melakukan realisasi cadangan.

Hal tersebut bukan merupakan indikator yang baik untuk laba mendatang, karena pada periode tersebut laba meningkat. Sedangkan pada perusahaan yang mempraktikkan konservatisme dan mengalami pertumbuhan dalam investasi akan menurunkan laba dilaporkan dan menciptakan cadangan. Dalam kaitan pajak penghasilan, hal ini diduga dapat mengarahkan terjadinya sengketa karena menyebabkan semakin besar perbedaan perhitungan pajak penghasilan menurut perusahaan dan perhitungan menurut fiskal.

Implikasi dari metode konservatisme yaitu pilihan metode akuntansi pada metode yang mengarahkan untuk melaporkan laba dan aset yang lebih rendah atau melaporkan biaya dan utang yang lebih tinggi. Praktik Konservatisme dapat terjadi karena Standar Akuntansi yang berlaku di Indonesia memperbolehkan perusahaan untuk memilih salah satu metode akuntansi dari kumpulan metode pengukuran yang di perbolehkan pada situasi yang sama (Soraya dan Harto, 2014). Hikmah (2013) fenomena konservatisme akuntansi di Indonesia telah banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan khususnya yang bergerak di bidang manufaktur. Hal ini disebabkan oleh pemahaman mengenai pentingnya peran konservatisme. Basu (1997) dalam Soraya dan Harto (2014) hasil penelitiannya konsisten dengan manipulasi manajemen terhadap laba. Manajemen mencatat aset lebih rendah untuk meningkatkan laba pada tahun berikutnya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kompensasi dan menyesatkan pasar modal.

Hendrikson dan Breda (1992) dalam Suprianto dan Dewi (2014) menyatakan bahwa penggunaan konsep konservatisme juga didasarkan pada alasan dalam pembayaran pajak. Konsep konservatisme yang merupakan konsep

kehati-hatian dalam mengurangi risiko, konsep ini menunda pengakuan pendapatan. Jika pendapatan mengalami penundaan, maka secara otomatis pengakuan laba yang dilaporkan akan semakin kecil. Oleh karena itu jika laba semakin kecil, maka pembayaran pajak akan semakin rendah.

Mayangsari dan Wilopo (2001) meneliti konservatisme akuntansi, *value relevance*, dan *discretionary accruals*: implikasi empiris model Feltham-Ohlson (1996). Hasil penelitian ini, memberikan bukti bahwa terdapat hubungan antara manajemen laba dengan konservatisme akuntansi. Pemilihan metode akuntansi yang konservatif tidak terlepas dari kepentingan pihak manajemen untuk memaksimalkan kepentingannya dengan mengorbankan kesejahteraan pemegang saham.

Soraya dan Harto (2014) meneliti pengaruh konservatisme akuntansi terhadap manajemen laba. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa konservatisme akuntansi berpengaruh terhadap manajemen laba secara signifikan dengan arah negatif. Perusahaan dengan konservatisme akuntansi yang besar memiliki manajemen laba yang lebih besar dengan cara melaporkan labanya lebih rendah.

Penelitian ini mengacu dari penelitian Soraya dan Harto (2014) Pengaruh Konservatisme Akuntansi Terhadap Manajemen Laba Dengan Kepemilikan Manajerial Sebagai Variabel Pemoderasi dan penelitian Widyawanti (2014) Analisis Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Sesuai UU NO. 36 Tahun 2008 Terhadap Praktik *Earnings Management* Sebagai Motivasi Penghematan PPh Badan. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan insentif pajak yang

merupakan perubahan tarif pajak penghasilan dan prinsip konservatisme akuntansi yang dapat mempengaruhi manajemen laba. Dari uraian latar belakang di atas melatarbelakangi peneliti mengambil judul skripsi “**Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Praktik Manajemen Laba Dengan Prinsip Konservatisme Akuntansi (Studi Empiris pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang *Listing* di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2013)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah insentif pajak berpengaruh terhadap manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan?
2. Apakah prinsip konservatisme akuntansi berpengaruh terhadap manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui bukti empiris mengenai pengaruh insentif pajak terhadap manajemen laba.
2. Mengetahui bukti empiris mengenai pengaruh prinsip konservatisme akuntansi terhadap manajemen laba.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu ekonomi pada khususnya, terutama mengenai studi tentang manajemen laba, insentif pajak dan prinsip akuntansi konservatisme. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi regulator sebagai pertimbangan dalam penyusunan standar akuntansi keuangan dan akuntansi perpajakan.

1.4 Batasan Penelitian

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini terbatas pada perusahaan manufaktur yang bergerak di subsektor makanan dan minuman selama 3 tahun berturut-turut dari tahun 2011 hingga 2013 yang *listing* di BEI, menerbitkan *annual report* (audit), dan sahamnya *listing* di BEI dari awal IPO sampai tahun 2013.
2. Perusahaan yang *listing* di BEI sebelum tahun 2010, sehingga perusahaan dapat menerapkan insentif pajak yang mulai diterapkan tahun 2010 sebesar 25%.